



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi sebagian Persyaratan
guna Mencapai Gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Disusun oleh:

DIANA NOORMA SARI

C0501021

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2006**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Indonesia umumnya beranggotakan penduduk setempat yang terdiri dari: suatu golongan suku bangsa dengan kehidupan tersendiri, para pendatang yang berasal dari luar Indonesia dan memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Masyarakat yang komposisi anggota demikian dinamakan masyarakat majemuk. Pengertiannya mengacu pada sebuah masyarakat yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang bersumber pada keanekaragaman masyarakatnya.¹

Kota-kota di Indonesia yang berpenduduk majemuk dapat dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama, adalah kota dengan masyarakat yang majemuk dan kebudayaan yang majemuk pula, dimana terdapat satu kebudayaan yang lebih dominan dibanding kebudayaan-kebudayaan yang lainnya (*dominant culture*). Kota Surakarta dan Yogyakarta termasuk dalam kategori ini. Kedua, adalah kategori kota yang memiliki masyarakat yang majemuk dan kebudayaan yang majemuk, tetapi tidak ada satu kebudayaan masyarakat yang anggotanya mendominasi kebudayaan masyarakat anggota lainnya. Komponen yang menjadi indikator kategorisasi ini, komposisi sosial penduduk (*the social demography*), kebudayaan lokal (*the established local culture*) dan distribusi kekuasaan (*the focus of power*). Bila ketiga komponen ini dikuasai oleh satu etnik tertentu, maka

¹ P. Suparlan, 1986, *Demokrasi Dalam Masyarakat Jawa, Terhimpun Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, halaman 15.

masyarakat tersebut dikatakan memiliki kebudayaan dominan.² Tidak adanya kebudayaan dominan menciptakan iklim kompetisi yang lebih ketat di segala bidang kehidupan dalam rangka memperoleh, merebut, dan mempertahankan sumber daya diantara anggota masyarakat, kesempatan untuk memperoleh sumber daya tidak sebesar jumlah sumber daya yang tersedia.

Pada masyarakat yang kompleks seperti ini, gejala perebutan sumber daya lebih kuat dibanding di daerah dimana kehidupan masyarakatnya lebih sederhana sesuai dengan pengertian “*urban*” yang mengacu pada sekumpulan orang dengan ukuran dan kerapatan tingkat tertentu, dimana amat sangat tergantung akan kesepakatan kerja.³ Kompleksitas dari kebudayaan masyarakat majemuk tercermin dalam berbagai sistem, organisasi, struktur, serta tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial anggota masyarakatnya.

Gejala yang merupakan tuntutan lingkungan ini, dihadapi masyarakatnya dengan mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok kepentingan baik dalam bentuk formal maupun informal. Pengorganisasi diri secara garis formal sering kali sulit dilakukan. Karena itu, organisasi kelompok kepentingan lebih banyak dijalankan menurut jalur-jalur informal dengan menggunakan kekerabatan, pertemanan, ritus-ritus, upacara-upacara, dan kegiatan-kegiatan simbolik yang dikenal sebagai gaya hidup. Atau dengan kata lain masyarakat melakukan pengorganisasi diri dengan menggunakan mekanisme budaya, yang dapat pula mengartikulasikan kelompok mereka.⁴

² Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 229-231.

³ _____, 1990, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, halaman 23.

⁴ S. De Jong, 1976, *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, halaman 23.

Bagi kelompok tertentu, pengorganisasian diri dengan menggunakan mekanisme budaya, sekaligus dapat pula merupakan cara untuk memperkuat status sosial mereka dalam masyarakat melalui pengaktifan simbol-simbol kelompoknya. Namun sesungguhnya kedua dimensi ini (formal dan informal) tetap digunakan secara bersama-sama. Pengorganisasian dengan cara formal berdasar pada kontrak dan yang informal berdasar pada moral, kegiatan-kegiatan ritual dan adat istiadat.

Bentuk yang terjadi antara kelompok-kelompok kebudayaan yang terwujud di dalam konteks sosial bersama ini merupakan gejala etnisitas yang sangat kompleks, dimana didalamnya terdapat faktor-faktor psikologi, sejarah ekonomi dan politik. Dengan kata lain, etnisitas merupakan sebuah variabel yang saling bergantung atau berkait dengan variabel-variabel lainnya. Dan kajian politik merupakan salah satu pendekatan untuk dapat menganalisis gejala dalam etnisitas dalam hubungannya dengan variabel ekonomi dan sosial.⁵

Kelompok etnik merupakan perwujudan dari gejala etnisitas, sebagai sekumpulan orang yang bersama-sama tunduk pada pola perilaku-perilaku normatif, dan merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar. Pola perilaku normatif yang dimaksud adalah bentuk-bentuk dan kegiatan simbolik seperti kekerabatan dan perkawinan, pertemanan, ritus-ritus dan berbagai upacara yang merupakan kebiasaan, adat-istiadat, bahkan kebudayaan.⁶ Dalam kondisi seperti masyarakat di kota-kota di Indonesia yang bersifat majemuk inilah etnik menjadi sangat penting. Ini dapat dilihat dari gejala adanya kelompok-kelompok etnik yang tetap mempertahankan pola dari kelakuan tradisionalnya di daerah urban.

⁵ Franz Magnis Suseno, 1993, *Etika Jawa, Sebuah Ananlisa Tentang Kebijakanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT. Gramedia, halaman 19-20.

⁶ Koentjaraningrat, 1994, *op. cit.*, halaman 255-258.

Salah satu bentuk etnik adalah asosiasi kekerabatan yaitu sebuah kelompok yang terorganisasi yang didasari atas hubungan kekerabatan anggota-anggotanya. Asosiasi kekerabatan merupakan kelompok kepentingan yang timbul di perkotaan dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan tujuan perorangan maupun kelompok secara keseluruhan. Sebab pada dasarnya kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Anggota-anggota memiliki kepentingan yang sama, pada umumnya menggunakan cara-cara pendekatan informal terhadap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan. Sedangkan asosiasi kekerabatan adalah kelompok non asosiasi. Kelompok kepentingan non-asosiasi ini hanya dibentuk bila terdapat kepentingan yang sama untuk diperjuangkan. Dengan kata lain keberadaannya hanya bersifat sementara, setelah itu mereka akan membubarkan diri.

Pada kenyataannya, tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang sama pun kelompok ini tetap ada dan kecenderungan untuk membubarkan diri tampaknya tidak terjadi. Bisa jadi hal ini akibat kondisi perkotaan masyarakatnya yang sangat kompetitif dalam segala bidang kehidupan. Sehingga tidak semua kelompok kekerabatan merasa perlu untuk membubarkan diri. Kepentingan yang akan dan harus diperjuangkan selalu ada.

Dengan begitu tidak selalu kelompok kekerabatan merupakan kelompok kepentingan non-asosiasi, ada kalanya mereka adalah kelompok kepentingan asosiasi. Mengkaji hubungan kekerabatan di masyarakat kompleks, kita akan

dapat menemukan unit-unit hubungan kekerabatan dalam sebuah korporasi.⁷ Sehubungan dengan ini terdapat dua unit hubungan kekerabatan yaitu pertama, kelompok lokal yang berlandaskan pada keturunan yang seringkali diasosiasikan dengan hak yang dimiliki oleh anak sulung. Kedua, unit korporasi yang berdasarkan pada garis unilini, yang dapat menjangkau melebihi lokal dan melebihi pada generasi ketiga dan keempat.

Asosiasi dan kekerabatan yang timbul diperkotaan dengan masyarakat majemuk ini dilihat dari hubungan yang didasari anggota-anggotanya dapat dibagi atas dua kategori dasar yaitu pertama, suatu organisasi kekerabatan dimana hubungan antara anggota-anggotanya atau kemungkinan untuk menjadi anggotanya, ditentukan atas dasar kekerabatan atau keturunan yang sama, masuk dalam kelompok ini yaitu perkumpulan keluarga atau Trah.⁸ Kedua, suatu organisasi kekerabatan dimana hubungan antara anggota anggotanya tidak ditentukan berdasarkan kekerabatan atau keturunan yang sama, tetapi didasarkan pada kesamaan daerah asal anggota.

Pada orang Jawa di kota, kelompok Trah ini mula-mula ada pada awal abad-20, didirikan oleh keturunan seorang bangsawan dari Kraton Yogyakarta⁹, dimana trah itu berupa organisasi masa kini yang bersifat formal, lengkap dengan suatu lambang, suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta daftar anggota yang resmi, seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan sebagainya. Kesamaan adat-istiadat, nilai-nilai dan asal usul (baik darah maupun daerah) merupakan hal lain yang mengikat. Kemudian muncul perkumpulan-

⁷ *Ibid.*, halaman 269-272.

⁸ P. Suparlan, 1986, *Keluargaan Dan Kekerabatan, Dalam Manusia Indonesia, Individu, Keluarga Dan Masyarakat*, Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 33.

⁹ “Trah Kanjeng Pangeran Harjo Soerjowinoto”

perkumpulan trah lain semacam itu, dimana diantara beberapa keluarga bangsawan lainnya, tetapi juga diantara beberapa keluarga priyayi.¹⁰

Kelompok priyayi merupakan suatu elit kelompok budaya, yang basis kekuasaan terakhir terletak pada pengawasan mereka atas pusat sumber-sumber simbolis masyarakat yakni agama, filsafat, seni, dan penulisan. Dimana lebih terperinci kelompok ini masih dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu priyayi berdasarkan darah atau keturunan (raja serta para bendara) dan priyayi berdasarkan pada pekerjaan atau pendidikannya yang sesungguhnya tetap saja dianggap sebagai kawula atau rakyat. Kelompok pertama juga sering disebut sebagai priyayi tradisional, sedangkan yang kedua disebut priyayi modern. Mengacu pada pengertian di atas, Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN) dapat dikategorikan sebagai kelompok priyayi dalam arti umum, dan kelompok yang berdasarkan darah atau keturunan dalam arti yang lebih khusus. Dalam masyarakat Jawa terutama pada masyarakat strata priyayi lebih dikenal dengan istilah Trah. Walaupun sesungguhnya istilah ini juga dikenal dan digunakan oleh kalangan diluar masyarakat priyayi.

Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN) adalah sebuah asosiasi kekerabatan yang menghimpun keturunan para adipati, kepala Kadipaten Mangkunegaran dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunagoro I sampai dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro VIII ditambah dengan keturunan Punggawa Baku yang berjumlah 40 orang. Berdasar pada kekerabatan atau keturunan yang sama, terorganisasi dengan baik, dan memiliki kelengkapan organisasi seperti layaknya sebuah

¹⁰ Koentjaraningrat, 1994, *op. cit.*, halaman 277.

organisasi modern. Di luar itu keturunan para Mangkunagoro ini membentuk kelompok-kelompok sendiri berdasar dan bermuara pada salah satu Mangkunagoro yang dikenal dengan sebutan Trah atau Paguyuban Trah . Sehingga ada Trah Mangkunagoro (disingkat MN) I, Trah MN II, dan seterusnya. Sedang Trah Punggawa Baku MN I dihimpun dalam Paguyuban Tri Darmo. Masing-masing trah memiliki kelengkapan organisasi dan kegiatan sendiri-sendiri pula. Gabungan trah inilah yang dihimpun dan dilembagakan dalam bentuk sebuah organisasi kekerabatan HKMN. Anggota Trah secara otomatis menjadi anggota organisasi kekerabatan HKMN.¹¹

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini untuk mengungkap tentang peran sosial budaya HKMN, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai konsep priyayi, pengertian trah, elit tradisional dan elit modern. Hal ini dikarenakan HKMN merupakan suatu asosiasi kekerabatan elit tradisional Jawa, memegang kekuasaan tertinggi yang menghimpun semua kekerabatan dan semua kegiatan priyayi Mangkunegaran.

Priyayi mengacu pada sekelompok orang dengan strata tertentu dalam masyarakat Jawa, digambarkan sebagai kalangan aristokrasi turun temurun yang oleh Belanda diambil dari raja-raja pribumi yang ditaklukan untuk kemudian diangkat sebagai pejabat sipil yang digaji. Priyayi merupakan suatu elit kelompok budaya, yang basis kekuasaan terakhirnya terletak pada pengawasan mereka atas

¹¹ Lihat Bab IV AD dan Bab III ART Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN) Suryasumirat, tahun 1988.

pusat sumber-sumber simbolis masyarakat yakni agama, filsafat, seni dan penulisan.¹²

Dalam konsep ilmiah para intelektual pada umumnya menyebut priyayi sebagai golongan elit, berpendidikan dan berkedudukan lebih baik dari rakyat kebanyakan, dan karena pendidikannya dapat menduduki jabatan-jabatan dalam administrasi pemerintah baik di dalam maupun di luar lingkungan pangreh Praja.¹³

Dalam masyarakat Jawa terutama dalam masyarakat strata priyayi dikenal istilah “trah”. Trah mempunyai arti turunan atas keturunan.¹⁴ Yang dimaksud adalah suatu garis keturunan, sehingga merupakan satu hubungan darah atau pertalian darah. Bagi masyarakat Jawa yang tinggal di Yogyakarta dan Surakarta, trah memiliki arti yang lebih luas dan mengacu pada bentuk organisasi sosial orang Jawa yang berdasarkan pada hubungan genealogis atau kekerabatan yang berorientasi pada pusat keturunan (ancestor).¹⁵ Dalam kaitannya dengan nilai priyayi yang dikenal sebagai elit tradisional dan berkembang menjadi elit tradisional modern, priyayi Mangkunegaran masih tampak adanya kecenderungan yang paradoksal. Yaitu pada satu sisi masih menampilkan sifat informal, konservatif dan kekeluargaan yang eksklusif disebut sebagai elit tradisional. Di sisi lain telah menunjukkan pola hidup yang demokratis dan modern yang disebut sebagai elit modern.¹⁶ Namun dalam perkembangannya segala kegiatan dan sasarannya telah meluas dan tidak hanya di lingkungan Mangkunegaran saja,

¹² Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: P.T. Pustaka Jaya, halaman 305.

¹³ Robert Van Niel, 1984, *Muncul Elite Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, halaman 68.

¹⁴ Prawiro Atmojo, 1981, *Bahu Sastra Jawa Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, halaman 267.

¹⁵ Syafri Sairin, 1982, *Javanese Trah Kin- Based Social Organization*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 3.

¹⁶ Robert Van Niel, 1984, *op. cit.*, halaman 87.

bahkan pada tahun 1980, priyayi Mangkunegaran telah aktif dalam pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pokok kajian yang nantinya akan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dan tujuan dibentuknya Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN)?
2. Bagaimana proses terjadinya ontran-ontran dalam tubuh Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN)?
3. Bagaimana peran Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN) Suryasumirat dalam strategi membangun korporasi kekerabatan?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan permasalahan yang telah diungkapkan, maka penelitian ini diarahkan pada tujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui latar belakang, proses dan tujuan dibentuknya Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN).
2. Ingin mengetahui proses terjadinya ontran-ontran dalam tubuh Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN).
3. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan sejauh mana peran Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN) Suryasumirat dalam strategi membangun korporasi kekerabatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk melengkapi temuan-temuan peneliti sebelumnya. Terutama memberi sumbangan pengetahuan tentang sejarah sosial dan budaya lokal, khususnya di daerah Surakarta.

2. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah karya penelitian tentang perkembangan kelompok kekerabatan elit tradisional Jawa terutama dalam upaya peningkatan peranannya dengan jalan merebut sumber daya sekaligus mempertahankannya melalui serangkaian proses sosial budaya. Sehingga peranan ilmu sejarah akan semakin nyata dan akan terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan dan penelitian lanjutan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini selain menggunakan dokumen sebagai sumber primer juga menggunakan sumber sekunder yang berupa pustaka-pustaka guna melengkapi penulisan ini. Terdapat beberapa buku yang dapat digunakan sebagai acuan pokok dalam penelitian ini yaitu:

George D. Larson dalam bukunya **Masa Menjelang Revolusi, Kraton Dan Kehidupan Politik Di Surakarta 1912-1942 (1990)**¹⁷ yang mengungkapkan kehidupan di Mangkunegaran tahun 1912-1942. Menurut Larson di dalam bukunya bahwa masyarakat Jawa secara tradisional terbagi dalam tiga kelompok sosial yaitu keluarga raja, pegawai/ pejabat kerajaan dan rakyat biasa. Di Mangkunegaran dalam administrasi kerajaan diserahkan kepada *regent* patih. Dalam hal lainnya Mangkunegaran abad XIX telah mengadakan reorganisasi dalam berbagai bidang. Selain struktur pemerintahan yang dibenahi juga masalah keuangan dan kelembagaan yang ada di Mangkunegaran.

Buku **Negara Dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau, Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX (1985)**¹⁸ karya Soemarsaid Moertono, banyak mengkaji tentang kedudukan raja dan seni bina negara di masa lampau dari segi magis-religius (identifikasi dewa dan raja). Buku ini sangat membantu untuk melihat pemerintahan di Jawa dari segi teknis (birokrasi dan struktur pemerintahan) dan dari segi ekonomis (pembiayaan negara). Hal ini dapat menjadi sebuah referensi awal dalam terbentuknya kelompok kekerabatan yang bernaung dalam sistem birokrasi, struktur pemerintahan, khususnya di Praja Mangkunegaran.

Asosiasi kekerabatan juga banyak dibahas oleh Suparlan dalam bukunya yang berjudul **Keluargaan dan Kekerabatan dalam Manusia Indonesia,**

¹⁷ George D. Larson, 1989, *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1924*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁸ Soemarsaid Moertono, 1985, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Individu, Keluarga dan Masyarakat (1986).¹⁹ Buku tersebut menjelaskan bahwa pada setiap proses sosial masyarakat terdapat antara lain kompetisi, kompromi, bahkan konflik dari masing-masing orang atau kelompok orang untuk mendapatkan serta menguasai kedudukan sosial atau jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu yang dapat memberikan kesempatan serta fasilitas kepada yang mendudukinya untuk mengatur, mendistribusikan, dan mengeksploitasi sumber-sumber daya yang ada, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. Selain itu juga dijelaskan mengenai pengertian kelompok elit atau kekerabatan di lingkungan keluarga, masyarakat dan nasional dengan sifat hubungannya.

Dalam buku **Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Indonesia (1983)**²⁰ karangan Clifford Geertz, menjelaskan mengenai sistem politik lokal merupakan keseluruhan dari nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersumber pada kebudayaan setempat (kebudayaan suku bangsa), dimana tindakan-tindakan politik serta kebijaksanaan-kebijaksanaan umum diatur dan dilaksanakan oleh warga masyarakat setempat. Sistem politik lokal masih tetap berlaku dalam kapasitas HKMN Suryasumirat sebagai organisasi kekerabatan dinasti penguasa sebuah kadipaten yang berlatar belakang kebudayaan Jawa, khususnya kebudayaan Jawa Priyayi dalam struktur masyarakat Jawa yang berlapis itu.

Koentjaraningrat dalam buku yang berjudul **Beberapa Pokok Antropologi Sosial (1992)**²¹ menjelaskan mengenai pengertian kelompok kerabat yaitu salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk kelompok yang ada. ditinjau dari fungsi-fungsi sosial kelompok kekerabatan dibedakan atas tiga kategori yaitu:

¹⁹ P. Suparlan, 1986, *Keluarga dan Kekerabatan dalam Masyarakat Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*, oleh A.W. Widjaja, Jakarta: Akademia Pressindo.

²⁰ Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: P.T. Pustaka Jaya.

²¹ Koentjaraningrat, 1990, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.

1. Kelompok kekerabatan berkorporasi (*Corporate Kingroup*). Kelompok-kelompok semacam ini umumnya memiliki keenam unsur ciri sebuah kelompok, kelompok ini beranggotakan sedikit.
2. Kelompok kekerabatan kadangkala (*Occasional Kingroups*). Kelompok ini umumnya memiliki lima unsur pertama dan tidak memiliki unsur terakhir yaitu sistem hak dan kewajiban anggotanya terhadap sejumlah harta pokok.
3. Kelompok kekerabatan menurut adat (*Circumscriptive Kingroups*). umumnya hanya memiliki dua unsur pertama yaitu sistem norma yang mengatur kelakuan anggota dan rasa kepribadian keluarga.

Buku **Keluarga Jawa (1983)**,²² karangan Hildred Geertz menjelaskan mengenai pengertian keluarga atau trah adalah salah satu kelompok kekerabatan dimana para anggotanya diperhitungkan berdasar garis keturunan. Dalam satu keluarga ada istilah “keluarga sedarah” dan “keluarga perbesanan”. Keluarga sedarah pada hakekatnya, bahwa orang Jawa memberikan suatu pengertian pada saudara dekat dan saudara jauh. Dalam hal ini diklasifikasikan sebagai saudara dekat adalah keempat orang kakek nenek dan anak wayah mereka, paman bibi ditambah dengan kakek dan nenek moyang serta cicit-cicit. Hubungan demikian disebut dengan istilah keluarga sedarah. Sedang yang dimaksud saudara jauh adalah hubungan pertalian darah di luar hubungan saudara di atas.

Sartono Kartodirdjo dalam bukunya **Perkembangan Peradaban Priyayi (1993)**²³ menjelaskan bahwa peradaban priyayi yang dilukiskan dalam studi ini berkembang dan dimantapkan dalam jangka waktu kurang satu abad dari

²² Hildred Geertz, 1983, *Keluarga Jawa*, Jakarta: P.T. Temprin.

²³ Sartono Kartodirdjo, 1993, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

pertengahan abad ke-19, yaitu semasa memuncaknya kekuasaan pemerintah kolonial sampai keruntuhannya. Bersamaan dengan perkembangan itu terjadilah proses modernisasi yang menuntut adaptasi dari masyarakat Jawa.

Dipandang secara demikian peradaban priyayi mengarungi masa transisi diri masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Proses adaptasi telah terjadi penuh dengan hambatan dari kekuatan konservatif. Selama kehidupan masih didominasi oleh kaum birokrat dengan kepemimpinannya yang polimorfik, serta otoritas tradisional, maka golongan priyayi berfungsi sebagai elit birokrasi yang menentukan pola hidup masyarakat Jawa. Pandangan hidup Indonesianistis mau tidak mau konservatif dan dapat berfungsi sebagai ideologi kaum *establishment*. Sementara itu modernisasi membawa serta pemasukan teknologi modern, suatu proses yang mengubah konstelasi golongan elit.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Surakarta, pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa Surakarta atau Solo dahulunya merupakan ibukota Kadipaten Mangkunegaran, asal muasal sejarah dan kebudayaan Mangkunegaran serta tempat awal berdirinya asosiasi kekerabatan Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN) Suryasumirat.

2. Metode Penelitian dan Pendekatan

Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kelompok kekerabatan Mangkunegaran di wilayah Surakarta serta penanganannya oleh pihak Praja Mangkunegaran. Studi ini merupakan studi sejarah sosial dan

pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan sosiologis. Adapun tujuan dari pendekatan historis ini, agar permasalahan yang diungkapkan dapat dilakukan secara diakronik. Mengungkapkan permasalahan secara diakronik, diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kompleksnya pokok permasalahan dalam studi ini. Maka diskripsi historis saja tidak dapat mengungkapkan permasalahan secara mendalam.

Oleh karena itu disamping diskriptif studi ini juga akan dilengkapi dengan penjelasan secara analitis. Selain itu pendekatan-pendekatan lain juga akan ditambahkan untuk memperkuat pendekatan historis. Disiplin-disiplin seperti ekonomi, sosiologi, antropologi dan politik merupakan alat analisis yang sesuai untuk menganalisa masalah asosiasi elit tradisional Jawa. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dari disiplin ilmu lain, maka dapat dikatakan bahwa studi ini memakai pendekatan multidimensional. Teori dari disiplin ilmu ekonomi, antropologi, sosiologi jelas merupakan analisis yang tepat dibanding hanya dengan penuturan sejarah saja yang lebih kronologis dan polos. Oleh karena itu untuk menganalisa permasalahan asosiasi elit tradisional Jawa, perlu memakai pendekatan multidimensional. Hal ini diharapkan pendekatan satu sama lain saling melengkapi. Penggunaan pemahaman konsep dari masing-masing disiplin ilmu, akan memperkuat analisa dan memperluas pandangan mengenai pokok permasalahan dalam studi ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Menurut Nugroho Notosusanto adalah kumpulan prinsip-prinsip atau aturan yang sistematis, dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha

mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan sejarah, menilai secara kritis dan menyajikan suatu sintesa dalam bentuk tulisan.²⁴

Sejalan dengan pendapat Winarno Surakhmad, bahwa metode historis adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul pada masa lampau untuk menentukan generalisasi yang berguna untuk memahami kejadian-kejadian sejarah.²⁵

Mengingat cakupan penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka prosedur penelitiannya pun menggunakan tahapan-tahapan dalam metode sejarah. Dalam metode historis tersebut kita akan bertumpu pada empat tahapan kegiatan antara lain:

a. Pengumpulan Data/ Heuristik

Dalam heuristik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka. Studi perpustakaan dilakukan sebagai unit kerja dalam proses pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder. Untuk mengetahui kevaliditasan penulisan digunakan sumber primer. Sumber primer yang dimaksud yakni arsip-arsip yang terdapat dalam arsip-arsip yang berada di Reksa Pustaka Mangkunegaran, arsip daerah Jawa Tengah, perpustakaan-perpustakaan dan Monumen Pers Nasional. Sebagai penunjang sumber primer, pengumpulan data dilakukan pula melalui sumber sekunder.

²⁴ Nugroho Notosusanto, 1978, *Masalah Penelitian Sejarah, Suatu Pengalaman*, Jakarta: Yayasan Indayu, halaman 1.

²⁵ Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar penelitian: Dasar, Metode dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, halaman 132.

b. Penyeleksian data/ kritik sumber

Kritik sumber yaitu memilih dan memilah sumber yang akurat dan menyeleksi sumber-sumber sejarah yang ada untuk memperoleh informasi yang valid. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik Intern.

c. Penafsiran data / interpretasi

Sering disebut dengan analisis sejarah yang menguraikan fakta sejarah dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Tahapan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu analisa dan sintesa. Analisa adalah menguraikan data dengan memperhatikan aspek kausalitas, sedang sintesa adalah menyatukan keduanya.

d. Penyajian data /historiografi

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi disini merupakan cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dan hendaknya penulisan tersebut mampu memberikan gambaran mengenai proses penelitian serta menyumbang wacana baru

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi bahan dokumen bertujuan untuk memperoleh dokumen yang berkaitan dengan peristiwa yang benar. Dokumen berfungsi menyajikan data untuk menguji dan memberikan gambaran

tentang teori, sehingga akan memberikan fakta-fakta untuk memperoleh pengertian tentang fenomena yang ada.²⁶

Dalam penelitian ini mengkaji dan menggunakan sumber tradisional berupa arsip-arsip atau dokumen serta buku-buku yang berada di perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran, yang meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKMN Suryasumirat, gambar dan arti lambang HKMN Suryasumirat, skema struktur organisasi HKMN Suryasumirat, surat keputusan, bagan kekerabatan masyarakat Jawa, kedudukan dan hubungan kerja keluarga – Puro – himpunan - kekerabatan, serta dokumen-dokumen lainnya yang menunjang dalam penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan bahan pelengkap dalam penelitian ini. Studi pustaka dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari buku serta karangan lain yang berkaitan dengan masalah birokrasi tradisional, khususnya yang membahas tentang kelompok kekerabatan elit tradisional yang digunakan untuk menambah penjelasan-penjelasan dari studi penelitian ini. Sumber tersebut dapat berupa karangan dari sejarawan asing maupun sejarawan lokal (Indonesia). Studi pustaka dapat diperoleh dari Perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, UPT Perpustakaan , UPT Monumen Pers Nasional,

²⁶ Louis Gottschalk, 1978, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Indonesian University Press, halaman 83.

Perpustakaan Permata Surakarta dan juga perpustakaan-perpustakaan lainnya.

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.²⁷ Sehingga diperoleh *Oral Historis* yang merupakan salah satu pendekatan yang bersifat sosial dan dapat menunjukkan sejarah yang demokratis.²⁸ Wawancara dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi atau pandangan secara lisan yang langsung atau tidak langsung terhadap informan yang mengetahui dan berpartisipasi dalam suatu peristiwa. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara antara lain dengan KRMTH. Soetono Pondjorahardjo, KR Ngt. T. Kustini Soemardi Lukitohutomo, KRTH. Widijatmo Sontodipuro, KRTH. Hartono Wicitro Kusumo dan beberapa informan pendukung yang lainnya.

4. Tehnik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, baik dari hasil dokumen dan studi pustaka. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan membandingkan terlebih dahulu dengan teori-teori untuk digunakan dalam menarik kesimpulan. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul peneliti menggunakan analisa diskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang didasarkan pada hubungan sebab akibat dari

²⁷ Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, halaman 129.

²⁸ Irawati Singarimbun, 1982, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, halaman 131-132.

suatu fenomena historis dalam situasi tertentu. Dari analisa tersebut akan dihasilkan suatu analisa yang bersifat analitis.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana uraian masing-masing bab diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan umum, terperinci mengenai komponen-komponen dari unit analisa dan variabel-variabel.

BAB I Pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian yang meliputi uraian lokasi penelitian, metode penelitian dan pendekatan, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisa data.

BAB II mengetengahkan tentang diskripsi umum Mangkunegaran yang meliputi sejarah singkat berdirinya Mangkunegaran, diskripsi wilayah kekuasaan Mangkunegaran, Struktur Birokrasi Mangkunegaran yaitu Birokrasi berdasarkan pangkat (kekuasaan) dan birokrasi berdasarkan jabatan (lembaga), serta perkembangan sistem pemerintahan otonomi Mangkunegaran.

BAB III menguraikan pokok pembahasan mengenai korporasi sistem kekerabatan di Pura Mangkunegaran yang mencakup tentang latar belakang berdirinya beberapa asosiasi kekerabatan masa Swapraja, bagaimana posisi dan peranan asosiasi diatur pada masanya. Serta membahas tentang HKMN yang terbagi dalam 3 sub bagian yaitu latar belakang dan tujuan terbentuknya, pembelahan dalam tubuh asosiasi dan penyatuan kembali menjadi HKMN Suryasumirat. Selain itu juga dibahas mengenai struktur dan konsep korporasi kekerabatan di dalam HKMN.

BAB IV membahas mengenai proses terjadinya konflik/ ontran-ontran dalam tubuh organisasi HKMN. Ontran-ontran di sini terbagi dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

BAB V membahas mengenai HKMN Suryasumirat tahun 1979-1998 dengan tujuan untuk meningkatkan peranannya sebagai asosiasi kekerabatan Mangkunegaran. Dalam bab ini terdiri dari 2 bagian uraian. Pertama, penguatan dan perluasan nilai-nilai Mangkunegaran yang dilakukan dalam skala lokal dan nasional di bidang, sosial, ekonomi dan budaya. Kedua, peran HKMN Suryasumirat dalam penataan kembali atau reorganisasi Mangkunegaran.

BAB VI Penutup. Dalam bab terakhir penulis mencoba menarik kesimpulan dari semua uraian yang terdapat dalam bab I, II, III, IV dan V. Sesudah bab penutup akan disajikan daftar pustaka sebagai literatur yang digunakan beserta lampiran-lampiran penunjang.

BAB II

DISKRIPSI UMUM MANGKUNEGARAN

Sejarah Singkat Berdirinya Mangkunegaran

Dalam berbagai literatur dan pembicaraan Praja Mangkunegaran sering disebut sebagai kerajaan.²⁹ Pendapat-pendapat seperti itu didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam Praja Mangkunegaran terdapat pimpinan yang kekuasaannya seperti raja, disertai dengan perlengkapan struktur birokrasinya seperti Patih, Wedana sampai pejabat terendah. Selain itu Praja Mangkunegaran

²⁹ Heather Sutherland, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, halaman 69.

juga memiliki wewenang dalam membuat hukum, kepolisian, keprajuritan dan peradilan,³⁰ sehingga mereka menyebut sebagai kerajaan Mangkunegaran.

Di samping itu ada pula yang menyebut Mangkunegaran sebagai Kadipaten,³¹ dan ada juga yang menyebut sebagai Pura Mangkunegaran.³² Sedangkan dalam konteks lisan sering disebut dengan Istana Mangkunegaran. Namun kesemuanya menunjukkan pada objek yang sama yaitu Praja Mangkunegaran.

Pada hakekatnya Praja Mangkunegaran merupakan wilayah kadipaten yang kedudukannya di bawah Kasunanan Surakarta. Maka Praja Mangkunegaran tidak dapat disebut kerajaan. Hal ini disebabkan Praja Mangkunegaran tidak diperbolehkan membuat alun-alun, menanam pohon *waringin kurung sakembaran*, duduk di *dampar* (singgasana), dan tidak diperkenankan membuat *balai winata* dan menjatuhkan hukuman mati. Selain itu pada hari-hari tertentu harus menghadap di Kasunanan Surakarta.³³ Dengan demikian Praja Mangkunegaran hanya dapat disebut sebagai wilayah kadipaten saja.

Mengenai sejarah berdirinya Praja Mangkunegaran sebenarnya tidak lepas dari sejarah Kerajaan Mataram yang didirikan pada akhir abad 16 oleh Panembahan Senopati dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645). Wilayahnya hampir seluruh Jawa kecuali wilayah

³⁰ Moh. Dalyono, 1977, *Ketataprajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksha Pustaka Mangkunegaran, halaman 19-49.

³¹ Radjiman, 1989, *Sejarah Surakarta*, Surakarta: Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret, halaman 43.

³² Titah Rahayu, 21 Agustus 1988, "*Mangkunegaran Ngalami Transisi*", Surabaya: Jaya Baya, halaman 45.

³³ Radjiman, 1989, *op. cit.*, halaman 44-46.

Kasultanan Cirebon dan Banten serta daerah Kompeni yang terletak diantara kedua Kasultanan itu.³⁴

Usaha pencaplokan wilayah Mataram oleh Belanda masih berlangsung pada masa pemerintahan Paku Buwono II. Sebagai imbalan atas bantuan Belanda, dalam perjanjian dituliskan bahwa Belanda tahun 1743 memperoleh seluruh pulau Madura dan semua daerah yang berada di sebelah Timur Pasuruan serta daerah Rembang dan Jepara menjadi bagian kekuasaan Belanda. Selain itu Mataram diwajibkan untuk menanggung semua biaya serdadu Belanda yang ditempatkan di ibukota Mataram. Selain itu di dalam kerajaan juga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said. Usaha Paku Buwono II untuk memadamkan pemberontakan Raden Mas Said mendorong Pangeran Mangkubumi untuk menumpas pemberontakan dengan memberi hadiah daerah Sukawati. Tapi Paku Buwono II telah dihasut oleh Patih Pringgoloyo sehingga pemberian hadiah dibatalkan dan akhirnya Mangkubumi bergabung dengan Raden Mas Said untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda karena kecewa dengan sikap Paku Buwono II.

Pada masa pemerintahan Paku Buwono III atas inisiatif Belanda, diadakan Perjanjian Gianti tahun 1755, yaitu antara Paku Buwono III dengan Pangeran Mangkubumi. Belanda telah mengatur dalam perjanjian tersebut bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, bagian yang menjadi kekuasaan Mangkubumi disebut Kasultanan dan beribukota di Yogyakarta, sedangkan bagian dari Paku Buwono III disebut Kasunanan yang beribukota di Surakarta. Jadi Perjanjian Gianti merupakan akhir dari sejarah kekuasaan Mataram yang secara

³⁴ Th. M. Metz, 1987, *Mangkunegaran Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*, Terjemahan Moh. Husodo, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 1.

langsung dikuasai oleh Belanda dan dua daerah yang dikuasai secara tidak langsung adalah Kasunanan dan Kasultanan.³⁵

Pada tanggal 24 februari 1757 Raden Mas Said menyerah kepada Sunan Paku Buwono III, dan dengan perantaraan Hartingh (wakil Belanda) mengadakan perjanjian yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Hasil dari perjanjian tersebut mengangkat Raden Mas Said menjadi Pangeran Miji dengan upacara istimewa dan diberi tanah lungguh (apanase) seluas 4000 karya (960 Jung). Pangeran Miji berarti Pangeran Panilih yang berarti langsung di bawah raja dan kedudukannya sama dengan Adipati Anom.³⁶

Berdirinya Praja Mangkunegaran juga tidak lepas dari perjuangan Raden Mas Said. Raden Mas Said adalah putra dari Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegoro dari Kartasura. Sedang Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegoro merupakan putra dari Sunan Mangkurat IV (Sunan Mangkurat Jawi) di Kartasura.³⁷

Raden Mas Said sejak kecil telah mengalami hidup yang prihatin karena selain telah ditinggal sang ibu, ayahnya juga telah di buang ke Ceylon kemudian ke Tanjung Harapan hingga wafatnya. Dalam usia 16 tahun Raden Mas Said keluar dari Kraton Kartasura, tepatnya tanggal 3 Rabi'ul awal tahun Jimakir, Windu Sangara, 1666 (1741 M). Sejak saat inilah Raden Mas Said memulai perjuangannya, keluar dari keraton diikuti oleh 18 pembantu utamanya yang

³⁵ *Ibid*, halaman 1.

³⁶ A. K. Pringgodigdo, 1939, *Sejarah Perusahaan-perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 16.

³⁷ RM Ng. Soemahatmaka, 1936, *Pratelan Para Dharah Dalem Soewargi Kandjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Mangkoenagoro I Hing Soerakarta Hadiningrat*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 6.

dengan gigih telah membantu perjuangan Raden Mas Said.³⁸ Dalam perjuangannya Raden Mas Said bersama para pembantu utamanya mempunyai ikrar *Tiji Tibeh* yang berarti mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Ikrar bersama ini kemudian dikenal dengan Sumpah Kawula Gusti atau Pamoring Kawulo Gusti maksudnya yaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama di pikul, ringan sama di jinjing.³⁹

Keberanian dan strategi pertempuran Raden Mas Said yang banyak berhasil tersebut, menyebabkan ia dikenal dengan sebutan Pangeran Sumbernyawa (Pangeran penyebar maut).⁴⁰ Pertempuran baru berhenti setelah Raden Mas Said mendapat perintah dari Sunan Paku Buwono III untuk kembali ke Surakarta guna mendampingi Sunan Paku Buwono III. Atas permintaan Sunan tersebut maka pada hari Kamis Pahing tanggal 4 Jimadilahir tahun Jimakir, 1682, Windu Sancaya, atau 1757 M, Raden Mas Said dengan pasukannya menghentikan pertempuran setelah digalang selama 16 tahun. Kemudian peristiwa kembalinya Raden Mas Said ke Surakarta ditandai dengan candra sengkala *Panembahing Dipangga Hangoyag Jagad* (1682 J),⁴¹ dalam sumber lain disebutkan *Mulat Sarira Hangrasa Wani* (1682 J atau 1757 M).⁴²

Setelah beberapa saat berada di Surakarta, pada tanggal 27 Maret 1757 Raden Mas Said menerima piagam dari Sunan Paku Buwono III sebagai pengukuhan atas penyerahan tanah seluas 4000 karya yang ditempatkan di bawah

³⁸ Ng. Satyapranawa, 1950, *Babad Mangkunegaran*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 29.

³⁹ RIW Dwidjosunana, R. Ng. Sastradihardjo, RMF Dwidjosaputra, 1972, *Sejarah Perjuangan Raden Mas Said*, Surakarta: Reksa Pustaka, halaman 11.

⁴⁰ *Pangeran Sumbernyawa Ringkasan Sejarah Perjuangannya*, 1988, Surakarta: Yayasan Mangadeg, halaman 17.

⁴¹ *Babad Panambangan*, Transkripsi Lasman Marduwiyoto, 1981, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 11.

⁴² RM Ng. Soemahatmaka, *loc. cit.*

kekuasaan Raden Mas Said yaitu Keduwang, Laroh, Matesih, dan Gunung Kidul.⁴³ Kemudian pada tanggal 5 Jumadilawal tahun 1683 atau 28 Desember 1757 Raden Mas Said dinobatkan sebagai Adipati Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I. dengan peristiwa penobatan tersebut berdirilah Praja Mangkunegaran yang ditandai dengan candra sengkala Guna Bujangga Rasa Wani (1757 M).

Diskripsi Wilayah Mangkunegaran

Untuk membahas wilayah Praja Mangkunegaran pada dasarnya tidak lepas dari proses berdirinya Praja Mangkunegaran dan batas-batas wilayahnya yang sudah ditetapkan sejak dulu. Wilayah Praja Mangkunegaran merupakan hasil dari pembagian wilayah daerah *Vorstenlanden*. Dalam peta wilayah *Vorstenlanden* terbagi dalam empat kerajaan dan salah satunya Praja Mangkunegaran. Melalui Perjanjian Salatiga tahun 1757 antara Pangeran Sumbernyawa dan Sunan Paku Buwono III serta Belanda sebagai perantara, mencapai kesempatan membagi wilayah Kasunanan menjadi dua yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Menurut Larson luas wilayah Mangkunegaran pada tahun 1930 adalah 2.751.0 Km² dengan total penduduk 897.818 orang dengan rincian 892.283 penduduk pribumi dan 5.535 penduduk non pribumi.⁴⁴

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pada tanggal 27 Maret 1757 Raden Mas Said telah menerima piagam dari Sunan Paku Buwono III sebagai pengukuhan atas panyerahan tanah seluas 4000 karya.⁴⁵ Adapun wilayah seluas

⁴³ A. K. Pringgodigdo, 1939, *op. cit.*, halaman 20-27

⁴⁴ George D. Larson, 1989, *Masa Menjelang Revolusi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman xiii dan xvii.

⁴⁵ Moh. Dalyono, 1977, *op. cit.*, halaman 3.

4000 karya tersebut meliputi: Keduwang 141 jung, Nglaroh 115,5 jung, Matesih 218 jung, Wiraka 60,5 jung, Haribaya 82,5 jung, Hanggabayan 25 jung, Sembuyan 133 jung, Gunung kidul 71,5 jung, Pajang 58,5 jung, Mataram 1 jung, dan Kedu 8,5 jung.⁴⁶ Dengan demikian jumlah seluruhnya seluas 979.075 jung / 4000 karya.⁴⁷

Daerah Swapraja Mangkunegaran ini dalam perkembangannya telah mengalami dua kali perluasan wilayah. Perluasan pertama terjadi pada tahun 1813 yaitu berupa penambahan wilayah sebanyak 1000 cacah / 240 jung yang diberikan oleh Raffles. Tanah ini merupakan bagian dari tanah milik Sultan yang diberikan Raffles ketika menyerang Sultan Hamengku Buwono II dan Sunan Paku Buwono IV, karena mereka telah membujuk untuk membangkang kepada pemerintah Inggris.

Tanah seluas 1000 cacah dari Raffles di atas diambil dari wilayah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta. Wilayah ini meliputi: Keduwang 72 jung, Sembuyan 12 jung, Mataram 2.5 jung, Sukawati bagian timur 95.5 jung, Sukawati bagian barat 28.5 jung, dan lereng Gunung Merapi bagian timur 29.5 jung. Sehingga jumlah keseluruhan seluas 1000 cacah / 240 jung.

Perluasan kedua terjadi pada tahun 1830 sebanyak 500 cacah / 120 jung. Tanah ini merupakan milik Kasultanan Yogyakarta yang terletak di Sukawati (timur laut Surakarta). Oleh karena itu jumlah seluruhnya sebanyak 5.500 cacah. Penambahan wilayah ini terjadi karena pada waktu berlangsungnya perang

⁴⁶ G.P. Rouffaer, *Vorstenlanden dalam Encyclopedie Van Nederlandche-Indie*, halaman 240-241.

⁴⁷ Perbandingan ukuran karya atau cacah adalah: 1 cacah = 4 bau, 1 bau = 0,7096 Ha = 7.096 m², 1 jung = 4 karya = 16 bau, keterangan ini dapat dilihat dalam G.P.Rouffaer, halaman 302-307.

Diponegoro, Mangkunegoro II telah menguasai daerah Sukawati dengan seijin kompeni Belanda.⁴⁸

Pada tanggal 27 September 1830 dibuatlah kontrak yang penting sesudah tahun 1755. adanya kontrak ini menyebabkan keempat Swapraja di Surakarta serta Yogyakarta memiliki wilayah yang saling terpisah dengan garis batas yang jelas. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1946.⁴⁹ Hal ini merupakan pembaharuan dalam perjanjian tahun 1755 yang membuat wilayah Swapraja tidak jelas batas-batasnya dan sering terjadi perang antar desa.

Tahun 1847 di Surakarta dilakukan reorganisasi dalam pembagian wilayah yang dilakukan oleh komisaris Belanda Mr. Van Nes dan Residen Baron de Geer. Untuk Praja Mangkunegaran pada tahun itu juga telah membagi wilayahnya menjadi tiga daerah Kabupaten Anom yang meliputi Karanganyar (timur laut), Wonogiri (tengah), dan Malangjiwan (barat). Namun pada tahun 1875 Malangjiwan diganti menjadi Kabupaten Anom Baturetno (selatan). Adanya pembagian ini maka Kabupaten Anom Karanganyar terdiri atas sebagian Sukawati bagian selatan, Matesih dan Haribaya. Untuk Kabupaten Anom Wonogiri terdiri atas Nglaroh, Hanggabayan dan Keduwang. Sedang Kabupaten Anom Baturetno meliputi Malangjiwan, Sembuyan, Wiraka, dan Ngawen. Masing-masing daerah kabupaten tersebut di bawah seorang Wedana Agung. Namun pada tahun 1891 Kabupaten Anom Baturetno dihapus dan digabungkan dengan Kabupaten Anom Wonogiri.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, halaman 247-250.

⁴⁹ M. Husodo Pringgokusuma, 1983, *Swapraja*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 11.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 296-297.

Perkembangan berikutnya di Praja Mangkunegaran dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran tahun 1903. Kabupaten ini mulai tahun 1917 nomor 37, dan sejak ini wilayahnya disebut daerah Kabupaten. Sehingga berturut-turut menjadi Kabupaten Kota Mangkunegaran, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri.⁵¹

Perubahan wilayah kabupaten terjadi lagi pada tahun 1929, dimana Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran dihapus. Sedang daerahnya dimasukan dalam Kabupaten Karanganyar. Tetapi perubahan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1930 Kabupaten Karanganyar dihapus dan dihidupkan lagi Kabupaten Kota Mangkunegaran. Sehingga sejak tahun 1930 di Praja Mangkunegaran hanya terdiri atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kota Mangkunegaran dan Kabupaten Wonogiri.⁵² Pembagian ini terus berlaku sampai tahun 1946.

Sehubungan dengan timbulnya gerakan anti Swapraja yang terjadi di Surakarta pada tahun 1946, peristiwa ini telah mengakibatkan dibekukannya kekuasaan Swapraja dan kekuasaan diambil alih Pemerintah Republik Indonesia. Kejadian ini diikuti dengan keluarnya Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 16/S.D. tanggal 15 Juli 1946.⁵³ Penetapan Pemerintah ini diantaranya berisi tentang perubahan wilayah Surakarta dari status Swapraja menjadi wilayah karisidenan yang langsung di bawah Pemerintah Republik Indonesia, sehingga dua kabupaten yang semula berada di bawah Praja Mangkunegaran saling melepaskan diri dan masing-masing menjadi Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar hingga

⁵¹ *Rijksblad Mangkunegaran* tahun 1917 nomor 37.

⁵² *Rijksblad Mangkunegaran* tahun 1930 nomor 8. lihat pula Moh. Dalyono, 1977, *op. cit.*, halaman 108.

⁵³ Penetapan Pemerintah 1946 No. 16/S.D. tanggal 15 Djuli 1946.

sekarang ini.⁵⁴ Sedangkan Praja Mangkunegaran sendiri menjadi istana tanpa pemerintahan yang resmi dan tinggal melestarikan warisan-warisan budaya yang ada.⁵⁵

Struktur Birokrasi Mangkunegaran

Birokrasi merupakan alat atau instrumen pemerintah untuk melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain birokrasi adalah suatu sistem untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan salah satu cirinya ialah adanya hirarki jabatan-jabatan (atasan dengan bawahan) yang diatur menurut undang-undang.⁵⁶

Sehubungan dengan birokrasi tersebut di Praja Mangkunegaran pada garis besarnya terdiri atas dua golongan, yaitu birokrasi berdasarkan pangkat (kekuasaan) dan birokrasi berdasarkan jabatan (lembaga). Bentuk birokrasi tersebut merupakan unsur-unsur yang berdasar dari budaya dan politik kerajaan yang diwarnai dengan sifat-sifat yang masih tradisional. Pola hubungan antara atasan dengan bawahan bersifat paternalistik seperti hubungan antara patron dan klien. Hal yang sama juga terjadi pada hubungan antara para pejabat dengan rakyat yang dipimpinnya, dimana patron adalah gusti dan klien adalah kawula.⁵⁷

1. Birokrasi Berdasarkan Pangkat (Kekuasaan):⁵⁸

⁵⁴ R. Joeniarto, 1982, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bandung: Penerbit Alumni, halaman 85-86.

⁵⁵ M. Husodo Pringgokusuma, 1983, *op. cit.*, halaman 16.

⁵⁶ Lance Castles, Nurhadiantomo, Suyatno, 1986, *Birokrasi Kepemimpinan Dan Perubahan Sosial Di Indonesia*, Surakarta: Penerbit Hapsara, halaman 26.

⁵⁷ Dorodjatun Koentjarajakti, *Birokrasi Di Dunia Ketiga: Alat Rakyat, Alat Penguasa Atau Panguasa*, PRISMA, (Jakarta: LP3ES, No. 10 Oktober 1980), halaman 31.

⁵⁸ *Serat Wewatoning Para Abdi Dalem Ageng Alit Ing Nagari Jawi*, tanpa tahun, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran.

Yang dimaksud birokrasi menurut pangkat atau kekuasaan ialah susunan atau urutan kepangkatan dalam pemerintahan Praja Mangkunegaran mulai pangkat teratas hingga pangkat yang terendah, yang sekaligus menunjukkan kekuasaan yang dipegangnya. Secara hirarkis birokrasi menurut pangkat itu sebagai berikut:

a. Adipati (Kepala Trah Mangkunegaran)

Jabatan Adipati merupakan puncak hirarki dari birokrasi di Mangkunegaran. Gelar yang di pakai seorang Adipati ialah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro. Adipati bertugas menangani seluruh kekuasaan Praja Mangkunegaran. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para pejabat dibawahnya.

b. Bupati Patih

Di Praja Mangkunegaran jabatan patih dipegang oleh Bupati sehingga disebut Bupati Patih. Kedudukan Bupati Patih ini langsung di bawah Adipati Mangkunegoro. Bupati Patih ini diangkat oleh Adipati Mangkunegoro dan bertugas sebagai pelaksana pertama perintah Adipati.

c. Bupati

Bupati adalah jabatan yang memimpin suatu kadipaten. Di Praja Mangkunegaran terdapat beberapa kabupaten dengan nama dan tugas yang berbeda-beda. Para Bupati ini di bawah koordinasi penguasa Bupati Patih Mangkunegaran.

d. Wedana

Seorang Wedana berkewajiban melaksanakan tugas secara operasional, dan secara hirarki kedudukannya di bawah Bupati. Wedana akan menerima perintah dari Bupati dan meneruskannya kepada pejabat dibawahnya.

e. Kaliwon

Pangkat Kaliwon kedudukannya di bawah wedana, namun ia diangkat langsung oleh Bupati. Tugas Kaliwon adalah meneruskan perintah dari Wedana kepada pejabat dibawahnya.

f. Panewu

Pangkat Panewu akan menerima perintah dari Kaliwon dan akan meneruskannya kepada pejabat dibawahnya. Selain itu Panewu harus melaporkan semua tugasnya kepada Kaliwon.

g. Mantri

Pangkat Mantri bertugas menyampaikan perintah dari Panewu kepada para pejabat dibawahnya.

h. Lurah

Pangkat Lurah ini bertugas menerima perintah dari kadipaten yang diterimanya lewat Mantri untuk diteruskan kepada pejabat dibawahnya. Di Praja Mangkunegaran pangkat Lurah ini dijabat oleh Demang dan Ranga. Demang bertugas mengurus pekerjaan di tingkat desa yang menjadi bawahannya. Sedangkan Ranga bertanggung jawab atas baik buruknya wilayah bawahannya.

i. Bekel

Bekel bertugas meneruskan perintah dari Lurah kepada pejabat dibawahnya. Dan Bekel juga bertanggung jawab atas baik buruknya pelaksanaan tugas-tugas di desa.

j. Jajar

Jajar merupakan pelaksana perintah yang datang dari Bekel.

Dalam struktur birokrasi, jajar merupakan pangkat yang terendah.

2. Birokrasi Berdasarkan Jabatan (Lembaga):⁵⁹

Birokrasi menurut jabatan atau lembaga ialah susunan dari jabatan-jabatan dalam pemerintahan Praja Mangkunegaran. Sedangkan lembaga di sini merupakan nama-nama dari dinas-dinas perkantoran di Praja Mangkunegaran. Adapun nama-nama jabatan (lembaga) tersebut ialah:

a. Kabupaten Hamong Praja (Pemerintahan Pusat)

Dinas ini langsung di bawah pejabat Bupati Patih. Kedudukannya sebagai pemerintahan pusat yang mengawasi semua kegiatan Praja. Dinas ini dibagi dalam tiga golongan yaitu:

1. Kawedanan / Kantor Nata Praja:

Tugasnya mengurus surat-menyurat, membuat dan memeriksa undang-undang peraturan praja. Dibawahnya terdapat beberapa kapanewon yaitu:

- Kapanewon / Kantor Hagnya Praja:

Tugasnya mengerjakan surat-menyurat dari kadipaten.

⁵⁹ Honggopati Tjitrohoepojo, 1930, *Serat Najakatama*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 58-62

- Kapanewon / Kantor Reksa Wilapa:

Tugasnya menerima, merawat, dan menyerahkan semua surat-menyurat pemerintahan praja.

- Kapanewon / Kantor Reksa Pustaka:

Tugasnya merawat buku-buku dan surat-surat milik Praja Mangkunegaran.

2. Kawedanan / Kantor Niti Praja:

Tugasnya memeriksa harta kekayaan praja. Dinas ini membawahi beberapa kantor yakni:

- Kapanewon / Kantor Niti Wara:

Tugasnya memeriksa peredaran keuangan praja.

- Kapanewon / Kantor Marta Praja:

Tugasnya memeriksa kas praja.

- Kapanewon / Kantor Karta Praja:

Tugasnya mengurus bidang pertanahan.

3. Kawedanan Reksa Hartana:

Tugasnya menerima dan mengeluarkan keuangan praja. Juga mengurus beasiswa dan dana pensiun para pegawai.

b. Kabupaten Pangreh Praja (Pemerintahan Dalam Negeri)

Dinas ini di bawah pejabat Bupati Pangreh Praja. Tugasnya menangani kepangreh-prajaan dan kepolisian.

c. Kabupaten Mandrapura (Dinas Istana)

Dinas ini di bawah pejabat Kaliwon (Bupati Anom). Tugasnya menangani urusan dalam istana (Pura Mangkunegaran)

d. Kabupaten Parimpuna (Kapasaran)

Kabupaten ini di bawah pejabat seorang Kaliwon. Tugasnya mengurus bidang kapasaran.

e. Kabupaten Karti Praja (Pekerjaan Umum)

Kabupaten ini dikepalai seorang Belanda dengan pangkat direktur. Tugasnya mengurus bidang pekerjaan umum di Praja Mangkunegaran.

f. Kabupaten Sindumarta (Bidang Irigasi)

Kabupaten ini dipimpin seorang inspektur yang berpangkat *chef* (sep). Tugasnya mengurus bidang pengairan.

g. Kabupaten Wanamarta (Kehutanan Mangkunegaran)

Dinas ini dikepalai oleh seorang Belanda yang berpangkat *opperhoutvester* (kepala kehutanan). Tugasnya mengurus soal kehutanan.

h. Kabupaten Yogiswara (Keagamaan)

Kabupaten ini dikepalai seorang Wedana (Pengulu). Tugasnya mengurus bidang keagamaan.

i. Kabupaten Kartahusada (Perusahaan Mangkunegaran)

Dinas ini dikepalai seorang Belanda berpangkat *superintendent*. Sedang tugasnya mengurus perusahaan milik Praja Mangkunegaran.

j. Kabupaten Sinatriya

Dinas ini dikepalai oleh seorang Wedana, sedang tugasnya ialah mengurus para putra sentana.

k. Pemerintahan Bidang Pertanahan

Dinas ini dikepalai oleh seorang Kaliwon. Tugasnya ialah mengatur soal tanah.

l. Pemerintahan Kedokteran

Dinas ini dikepalai oleh seorang dokter dengan sebutan *Arts*. Tugasnya menjaga kesehatan bagi para putra dan nara praja.

m. Pemerintah Martanimpuna (Kantor Inspektur Pajak)

Dinas ini dikepalai oleh seorang Kaliwon. Tugasnya ialah memeriksa dan meningkatkan pemasukan uang dalam praja.

n. Pemerintah Legiun

Dinas ini dikepalai oleh seorang Letnan Kolonel dari bangsa Belanda. Sedangkan tugasnya mengurus bidang keprajuritan.

o. Pasinaon Dhusun (Pendidikan Desa)

Dinas ini dikepalai seorang *sinder* sekolah rakyat. Tugasnya mengurus dan memajukan pendidikan di desa.

Dinas-dinas perkantoran di atas dalam perkembangannya mengalami penyederhanaan dan penyempurnaan. Hal ini seiring dengan adanya usaha reorganisasi dan demokratisasi Praja Mangkunegaran. Maka dari sekian banyak dinas kantor tersebut ada yang dihilangkan dan ada yang tetap dilestarikan. Adapun susunan dinas-dinas kantor setelah reorganisasi menjadi sebagai berikut:⁶⁰

a. Kabupaten Kasatriyan

Ini merupakan organ kerja Pura Mangkunegaran yang mencakup fungsi dan tugas bidang pengelolaan dan administrasi mengenai upacara tradisi, dan adat istiadat Mangkunegaran, serta silsilah Trah Mangkunegoro dan Trah Punggawa Baku Mangkunegoro I, maupun pemberian gelar.

b. Kabupaten Reksa Budaya

Organ ini dibentuk untuk menyesuaikan antara fungsi dan tugas dari Pura Mangkunegaran serta kegiatan kerabat Mangkunegaran di bidang tradisi dan budaya Mangkunegaran. Adapun fungsi dan kegiatannya adalah untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dan fungsi dari Reksa Pustaka, Langen Praja, dan Museum.

⁶⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Kekerabatan Mangkunegaran (HKMN) Suryasumirat tahun 1988

c. Kabupaten Mandrapura

Fungsi dan tugas dari Kabupaten Mandrapura ialah mendukung kegiatan Pura Mangkunegaran pada umumnya dan kegiatan Reksa Budaya pada khususnya dalam aspek personil, dana, materi, dan perawatan, maupun prosedur-prosedur kerja Pura Mangkunegaran.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Otonomi Mangkunegaran

Raden Mas Said lahir pada hari Minggu Legi tanggal 7 April 1725 atau tanggal 4 Ruwah Jumakir 1650 AJ. Menurut De Jonge Raden Mas Said putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dengan Raden Ayu Wulan, Putri dari Pangeran Blitar. Dengan alasan politis Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro di buang ke Ceylon (Srilangka). Raden Mas Said pada usia 14 tahun diangkat sebagai mantri gandek dan mendapat tanah lungguh seluas 25 Jung di daerah Ngawen, Gunung Kidul. Merasa tersingkir dari pergaulan kraton, pada tahun 1741 Raden Mas Said bersama 18 pengikutnya meninggalkan kraton dan pergi ke Nglaroh, daerah asal salah satu pengikutnya (Suradiwangsa). Tahun tersebut merupakan awal gerakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said untuk memperoleh keadilan. Selama di Nglaroh melakukan latihan perang dan bergabung dengan Sunan Kuning untuk melawan Belanda dan sekutunya. Raden Mas Said dikenal dengan nama Pangeran Sumbernyawa dan mempunyai taktik perang yang ampuh sehingga sangat disegani oleh lawan. Sebagai seorang panglima perang Pangeran

Sumbernyawa bergelar Pangeran Prang Wedana Pamot Besur dan tahun 1743 memegang jabatan Pangeran Adipati Mangkunegoro.⁶¹

Pada awal berdirinya, Mangkunegaran diperintah oleh Pangeran Sumbernyawa yang bergelar Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I, yang memerintah mulai tanggal 24 Februari 1743-28 Desember 1795. Kedudukan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I sebagai Pangeran Miji bagi Sunan, maksudnya pangeran yang berada langsung di bawah Sunan. Menurut *Acte Van Verbond* (surat penobatan) yang menjadi dasar pengangkatan dari Mangkunegoro I, disebutkan hak-hak yang diberikan oleh sunan Paku Buwono III kepada Mangkunegoro I ini. Mangkunegoro I mendapat gelar pembentuk kerajaan Mangkunegaran atau *Stichter*.⁶² Dalam hal ini Mangkunegoro I dianggap sebagai pencetus konsep dasar pemerintahan rakyat.

Masa pemerintahan Mangkunegoro I diwarnai dengan berbagai macam peristiwa politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu yang patut dicatat adalah adanya “Korps Pasukan Mangkunegaran” yang merupakan cikal bakal dari “Legiun Mangkunegaran” termasuk didalamnya korps prajurit wanita (estri).⁶³

Sebagai budayawan peranan Mangkunegoro I sebagai pengembang kebudayaan Jawa pada umumnya, sekaligus peletak dasar kebudayaan khas Mangkunegaran khususnya cukup besar. Ia menciptakan beberapa tarian bedhaya dan serimpi antara lain Bedhaya Anglir Mendhung, Bedhaya Diredometo, dan Bedhaya Sukohetomo yang kesemuanya bertemakan perjuangan.⁶⁴

⁶¹ RM Ng. Soemahatmaka, 1940, *Riwayatipun Sri Mangkunegoro I-VII*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran

⁶² A. K. Pringgodigdo, 1939, *op. cit.*, halaman 18.

⁶³ Ann Kumar, 1990, *Masyarakat Istana Jawa dan Politik Dalam Akhir Abad XVIII*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 8-9.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 19

Mangkunegoro I juga menghasilkan suatu karya yang tak ternilai yakni penulisan 8 surat Al Quran dalam aksara Jawa yang disalin sendiri dengan tulisan tangan dari Al Quran beraksara Arab-pegon. Karya besar yang usianya lebih dari 200 tahun ini, sampai saat ini masih tersimpan dengan baik di perpustakaan Reksopustaka Surakarta.

Pengganti Mangkunegoro I adalah cucunya, yang bernama Raden Mas Sahdat lahir hari Senin Pon 14 Ruwah Jimawal 1693. Pada usia 14 tahun di wisuda dengan gelar Kanjeng Pangeran Haryo Suryamataram dan menikah dengan Putri Tumenggung Mangkuyudo di Kedu serta di wisuda dengan gelar Surya Prangwedana.⁶⁵ Pada tanggal 25 Januari naik tahta dengan gelar Pangeran Ario Prabu Prangwedana. Pada masa pemerintahan Mangkunegoro II, Daendels ingin Mangkunegoro II benar-benar menjadi seorang pangeran merdeka, yang tidak hanya diberi 4000 ringgit setiap tahun, tapi juga mempunyai tentara sendiri. Pada tahun 1803 korps didirikan kembali dengan nama “Legioen Van Mangkoe Nagoro” atau Legiun Mangkunegaran.⁶⁶ Di bawah pemerintahan Adipati Mangkunegoro II (25 Januari 1796-1835) daerah kadipaten bertambah 740 jung atau sama dengan 1022 Ha. Hubungan baiknya dengan Raffles dan bantuannya dalam menghadapi Sultan Hamengku Buwono II, menghadiahkan sebagian daerah Kasultanan Yogyakarta sebagai daerah milik Mangkunegaran, karena keberanian dan hubungan baik ini pulalah, Mangkunegoro II memperoleh penghargaan “*Ridder in de Militaire Willems Orde*”. Ia merupakan orang Jawa pertama yang menerima penghargaan militer setinggi itu.⁶⁷

⁶⁵ RM Ng. Soemahatmaka, 1940, *op. cit.*, halaman 58.

⁶⁶ Sawanta W, 1978, *Legiun Mangkunegaran*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 8-9.

⁶⁷ Th. M. Metz, 1987, *op. cit.*, halaman 5

Penguasa Mangkunegaran selanjutnya adalah cucu dari Mangkunegoro II yang bernama Raden Mas Sarengat yang di wisuda dengan nama Pangeran Haryo Prabu Prangwedana serta menikah dengan Putri Paku Buwono V dari Kanjeng Ratu Emas.⁶⁸ Mangkunegoro III memerintah tanggal 25 Mei 1835 - 6 Januari 1853. Masa pemerintahannya, keinginan agar menjadi Pangeran Merdeka makin kuat. Sebenarnya tanda-tanda kearah itu sudah tampak pada masa pemerintahan Mangkunegoro II. Hal ini tergambar dalam tulisan di bawah ini;

“..Residen Palm pernah melaporkan kepada instansi atasannya, bahwa Mangkunegoro tidak hadir pada perayaan Gerebeg. Menghadiri perayaan Gerebeg adalah sangat penting. Pada saat itulah semua orang keraton sebagai bukti suatu kesetiaan “⁶⁹

Pada tahun 1896 Praja Mangkunegaran sudah lepas sama sekali dari Kasunanan, Mangkunegoro IV sudah menjadi Pangeran Amardiko (Pangeran Merdeka) terhadap Sunan dan menjadi Pangeran Miji terhadap pemerintah kolonial.⁷⁰ Masa Pemerintahan Mangkunegoro III keadaan sosial ekonomi sangat buruk. Hal itu disebabkan tanah yang diperuntukan bagi perkebunan kopi belum dimanfaatkan dengan baik.⁷¹

Pengganti Mangkunegoro III adalah kemenakannya, cucu dari Mangkunegoro II yang bernama Raden Mas Soedira yang lahir pada Ahad Legi, 8 Sapar Jumakir 1738 Windu Sancaya. Mangkunegoro IV naik tahta dan mendapat gelar Pangeran Adipati Aryo Prabu Prang Wedono serta memerintah mulai tanggal 25 Maret 1853 – 5 September 1881.⁷² Langkah awal yang dilakukan Mangkunegoro IV adalah melakukan pembangunan ekonomi *onderneming*, yaitu

⁶⁸ RM Ng. Soemahatmaka, 1940, *op. cit.*, halaman 30.

⁶⁹ Ann Kumar, 1990, *op. cit.*, halaman 138.

⁷⁰ A. K. Pringgodigdo, 1939, *op. cit.*, halaman 19.

⁷¹ George D. Larson, 1990, *op. cit.*, halaman 354, lihat pula *Ibid*, halaman 26-27.

⁷² RM Ng. Soemahatmaka, 1940, *op. cit.*, halaman 71-80.

melalui perbaikan di bidang sosial ekonomi yang memburuk pada masa pemerintahan Mangkunegoro III. Mangkunegoro IV dikenal bukan saja sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga dikenal sebagai ahli ekonomi, penuh inisiatif, dan daya cipta. Di bidang pemerintahan Ia meneliti kembali dan mempertegas batas-batas daerah kekuasaan Mangkunegaran dengan milik Kasunanan serta Kasultanan Yogyakarta. Dalam bidang kemiliteran ia mewajibkan setiap kerabat Mangkunegaran yang telah dewasa menjalani pendidikan militer (wajib militer). Syarat menjalani wajib militer ini diberlakukan pula pada mereka yang hendak menjadi pegawai praja.

Di bidang sosial ekonomi, Ia banyak menciptakan usaha komersial menjadi sumber penghasilan praja. Keberhasilannya di bidang ini diwujudkan dalam bentuk pendirian pabrik-pabrik antara lain pabrik gula di Tasikmadu, Colomadu, dan Gembongan, pabrik sisal di Mentotulakan, pabrik bungkil di Polokarto, pabrik bata dan genting di Kemiri. Memperluas usaha perkebunan dengan mengusahakan jenis tanaman selain kopi seperti palawija, padi, rempah-rempah, tebu, kina, di samping mencanangkan gerakan penanaman kopi sampai di pelosok-pelosok.⁷³

Setelah Mangkunegara IV turun tahta digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Raden Mas Sunita. Memerintah mulai tahun 1881-1896 dan mendapat gelar seperti ayahnya. Masa pemerintahan Mangkunegara V yang tergolong singkat sempat mengalami krisis ekonomi (1875-1890) yang melanda berbagai negara termasuk Praja Mangkunegaran.⁷⁴

⁷³ A. K. Pringgodigdo, 1939, *op. cit.*, halaman 20; lihat pula *Suara Merdeka*, Sabtu, 24 Agustus 1985.

⁷⁴ Metz, Th. M, 1987, *op. cit.*, halaman 6.

Pemerintah selanjutnya digantikan oleh saudaranya yang bernama Raden Mas Suyitno. Mangkunegoro VI memerintah tahun 1896-1916, pada masanya pengaruh kraton Kasunanan serta kewajiban untuk mengirimkan dua pangeran untuk mengabdikan di kraton dihapuskan.⁷⁵ Mangkunegoro VI merasa mempunyai kewajiban untuk memperbaiki perekonomian akibat krisis ekonomi yang terjadi pada masa Mangkunegoro V. Mangkunegoro VI merupakan raja yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang, terbukti dengan adanya pemisahan antara keuangan kerajaan dan keuangan pribadi raja dan tahun 1916 Pemerintah Mangkunegaran membentuk sebuah komisi yang bertugas sebagai pengawas hak milik Praja Mangkunegaran.⁷⁶

Pada tahun 1916 Mangkunegoro VI turun tahta dan digantikan oleh Raden Mas Ario Soeparto, putra dari Mangkunegoro V. Raden Mas Ario Soeparto naik tahta tahun 1916-1944 dengan gelar Pangeran Adipati Ario Prang Wedono. Mangkunegoro VII merupakan seorang raja yang cakap, dalam arti berpandangan luas serta pandai dalam berorganisasi. Selain itu juga merupakan seorang Panglima Legiun dengan pangkat *Colonel Comandant*. Pada waktu itu pengangkatannya Residen Surakarta Solewijn Gelpke mengharapkan bahwa Mangkunegoro VII untuk lebih memperhatikan kehidupan rakyat kecil dan menjadi contoh bagi masyarakat Jawa.⁷⁷ Pada tahun 1931 Mangkunegoro VII mendapat gelar *Zijne Hoogheid* (sri paduka) dan diangkat menjadi ajudan Ratu Belanda. Sebagai seorang yang suka berorganisasi, Mangkunegoro VII banyak terlibat dalam berbagai organisasi politik dan kebudayaan selain itu juga aktif di bidang pers pada masa itu.

⁷⁵ RM Ng. Soemahatmaka, 1940, *op. cit.*, halaman 102.

⁷⁶ Metz, Th. M, 1987, *op. cit.*, halaman 6-7

⁷⁷ *Ibid*, halaman 11

Mangkunegoro VIII mengawali masa pemerintahannya pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1944. Ia adalah putra ketiga Mangkunegoro VII dari istri selir Bandara Raden Ayu Retnaningrum yang bernama Raden Mas Sarosa yang lahir 1 Januari 1920. berdasarkan kekancingan No. 4 tanggal 19 Juni 1937 diwisuda dengan nama Pangeran Haryo Hamijoyo Sarosa. Masa pemerintahannya merupakan masa transisi (peralihan) dari sebuah swapraja yang memiliki otonomi “penuh” menjadi sebuah aset budaya yang tidak memiliki kekuasaan politik dan wilayah lagi. Satu tahun setelah penobatannya, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia dinyatakan berdiri. Peristiwa ini menghadapkan Mangkunegaran pada posisi yang sulit.

Satu hari setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 (19 Agustus 1945) Presiden Soekarno menyampaikan piagam⁷⁸ kepada Mangkunegoro VIII dan Sunan Paku Buwono XII yang isinya “mengajak” Mangkunegoro VIII dan Sunan Paku Buwono XII bersama-sama memikirkan kelanjutan Republik ini.

Piagam ini dibalas dengan Maklumat tertanggal 1 September 1945 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa kerajaan Mangkoenegaran Soeatoe daerah Istimewa daripada Negara Repoeblik Indonesia.
2. Bahwa semoea oeroesan pemerintahan dalam keradjaan Mangkoenegaran kini ditetapkan dan dipimpin sendiri oleh Mangkoenegaran sendiri dengan mengingat peratoeran Pemerintah Repoeblik Indonesia.
3. Bahwa perhoeboengan Pemerintah Keradjaan Mangkoenegaran dengan Pemerintah Repoeblik Indonesia bersifat langsoeng.⁴⁸

Ternyata keadaan menjadi semakin buruk dan penuh kecurigaan serta ketegangan. Swapraja di Surakarta tidak seberuntung Yogyakarta. Mangkunegoro

⁷⁸ Dikenal sebagai Piagam Kedudukan Kepala Daerah Mangkunegaran dan Kasunanan.

⁴⁸ Piagam Mangkunegaran, Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran.

dan Sunan Paku Buwono selain sama-sama baru, belum mempunyai pengalaman, juga kurang memiliki kewibawaan pribadi dan kurang mampu menjembatani berbagai pendapat yang timbul ketika itu. Selain tidak serukun dan seia sekata seperti penguasa-penguasa kerajaan di Yogyakarta, konflik sosial yang telah ada selama ini semakin memperburuk situasi.⁸⁰

Kasultanan memang memiliki posisi yang lebih dominan dibanding Pakualaman. Baik ditinjau dari sejarah berdirinya maupun dari statusnya dalam politik lokal (Jawa). Sehingga hampir semua kebijakan dan keputusan politik Kasultanan memperoleh dukungan dari Pakualam. Hal ini tidak berlaku di Surakarta, Kasunanan dan Mangkunegaran, selain persaingan hebat antara keduanya Mangkunegaran menolak setiap hubungan dengan Kasunanan bila tidak berdasarkan persamaan status. Pada tanggal 30 April 1946 Susuhunan menyerah dan mengeluarkan sebuah pengumuman;

Mengingat apa jang terseboet dalam pasal 18 anggaran dasar kita dan piagam PJM Presiden tanggal 19 Agoestoes 1945 dan mengetahoei gerak-gerik di dalam kalangan rakjat di daerah kami, hal lenjap atau tidaknja daerah istimewa Soerakarta Hadiningrat, kami memakloematkan kepada rakjat kami, bahwa jikalaoe memang terang mandjadi kehendak rakjat sebenar-benarnja akan lenjapnya Daerah Istimewa Soerakarta Hadiningrat dan telah ditetapkan oleh pemerintah Negara Repoeblik Indonesia, kami tidak berkeberatan akan menjerahkan pemerintahan kami kepada Pemerintah Agoeng.⁸¹

Sebaliknya, pada tanggal 1 Mei 1946 pemerintah Mangkunegaran mengumumkan secara resmi akan mengeluarkan undang-undang dasar baru untuk wilayah Mangkunegaran. Undang-undang Dasar tersebut menetapkan

⁸⁰ Suyatno Kartodirjo, 1974, *Revolusi dan Kondisi Sosial di Surakarta 1945-1950*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran, halaman 58.

⁸¹ Benedict Anderson, 1988, *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang Dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta: Sinar Harapan, halaman 386-392.

Mangkunegaran sebagai kepala dari sebuah Daerah Istimewa Mangkunegaran yang berada langsung di bawah Presiden. Mangkunegoro akan dibantu oleh sebuah dewan perwakilan yang dipilih dari penduduk wilayahnya. Batas-batas wewenang Mangkunegaran akan ditentukan oleh pemerintah pusat, dan semua keputusan akan diselaraskan dengan tiga ex-Swapraja di Jawa Tengah lainnya. Pengumuman tersebut menggambarkan tekadnya untuk meneruskan, baik otonominya berhadapan dengan Sunan maupun status politik yang disamakan dengan Sultan di Yogyakarta.⁸²

Kelompok anti Swapraja yang antara lain dimotori oleh Barisan Banteng dan Hizbullah, berjalan terus dengan revolusi sosialnya. Komite Nasional Indonesia Daerah di Surakarta (KNI Daerah), sebagai perkembangan dari KNI pusat. Setelah proklamasi, mengubah sistem pemerintahan daerah dari sistem delegasi menjadi sistem direktorium. Dalam kedua sistem sebelumnya kedua raja masih diikutsertakan, tetapi pada sistem terakhir (direktorium) terjadi mosi penolakan dari keduanya dengan alasan antara lain bahwa;

1. Dalam Direktorium duduk tiga orang anggota yang berhaluan kiri dan sangat anti Swapraja.⁸³
2. Direktorium mempersempit dan mengurangi kekuasaan dan hak-hak Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta yang sudah ada berdasarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia September 1945.

Karena situasi tidak semakin baik, tanggal 24 April 1946 kedua raja mengeluarkan maklumat kepada rakyatnya;

⁸² *Ibid*, halaman 341.

⁸³ *Tempo*, 24 November 1990.

“Kami mempermakloemkan kepada rakjat kami, bahwa djikaloe memang terang menjadi kehendak rakjat sebenar-benarnja akan lenjapnja Daerah Istimewa Soerakarta Hadiningrat dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Repoeblik Indonesia, kami tidak keberatan akan menjerahkan pemerintahan kami kepada Pemerintahan Agoeng tadi”.⁸⁴

Segenap daya upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi kesulitan dalam usaha menjaga kelangsungan hidup. Praja Mangkunegaran, nampaknya telah teratasi lagi. Terbatasnya kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia di Surakarta dan kuatnya pengaruh badan-badan perjuangan yang anti kekuatan yang mapan (Swapraja), menjadi sebab hilangnya status Swapraja bagi kedua daerah kerajaan. Keluarlah Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1946 No. 16 / S.D. Isi surat penetapan tersebut adalah; mengenai pembentukan Karesidenan Surakarta, yang berarti pula sebagai pembentukan bagi Pemerintahan Praja Mangkunegaran dan Kasunanan.⁸⁵

Kelanjutan surat penetapan itu adalah, diberlakukannya UU Pokok Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah melalui UU Republik Indonesia No. 10 tahun 1950. Dengan demikian Karesidenan Surakarta yang merupakan bekas Kasunanan dan Mangkunegaran tidak dibentuk sebagai Daerah Istimewa. Bersamaan dengan hapusnya pemerintahan Swapraja dengan Penetapan Pemerintahan Republik Indonesia tahun 1946 No. 16 / S.D, berakhir pulalah riwayat kadipaten hasil perjuangan Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyawa yang kemudian bertahta sebagai Mangkunegoro I. Disamping ini hapus pulalah orang-orang yang menyebut

⁸⁴ Maklumat Mangkunegoro, Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran

⁸⁵ Penetapan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1946 No. 16/S.D, Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran

dirinya sebagai rakyat Mangkunegaran. Orang-orang inilah yang kemudian menggabungkan diri ke dalam HKMN.

Ada hal yang perlu dicatat selama perjalanan Praja Mangkunegaran, khususnya menyangkut pemerintahannya;

1. Pelaksanaan regenerasi kepemimpinan mempunyai tradisi tersendiri, yaitu tentang seseorang yang berhak dinobatkan sebagai Mangkunegoro. Dalam hal ini tidak harus anak cucu laki-laki, namun setiap keluarga entah cucu, anak, adik, menantu, kemenakan ada kemungkinan untuk dapat menggantikan sebagai kedudukannya pendahulunya. Adapun status Mangkunegaran, ia bukanlah raja, tetapi hanya seorang pemimpin dalam Pura Mangkunegaran, seorang Adipati. Berhubung pengaruh kepemimpinannya di mata masyarakatnya disamakan dengan seorang raja. Maka untuk menggantikan kedudukan Mangkunegaran harus dipilih anggota keluarga yang dianggap mampu dan mumpuni sebagai pemimpin, yang pemilihannya berdasarkan pada musyawarah Dewan Pinisepuh Himpunan Kerabat Istana Mangkunegaran, yang membedakan dengan tradisi kebangsawanan lainnya. Mangkunegoro sebagai penguasa Praja mempunyai wewenang untuk mengatur kerabat Mangkunegaran yang tersebar di berbagai daerah. Adapun yang dimaksud dengan kerabat adalah sentana (keturunan Mangkunegoro), keturunan Punggawa Baku, para pegawai Mangkunegaran, Trah dan atau karena perkawinan dengan Trah

Mangkunegoro I dan seterusnya.⁸⁶ Punggawa Baku adalah para pembantu terdekat atau pasukan inti atau pasukan komando Mangkunegoro I yang berjumlah 40 orang.

2. Demokratisasi di Mangkunegaran tidak hanya dalam hal regenerasi kepemimpinan tetapi juga menjelma dalam bentuk lain, misalnya dalam hal sopan santun atau tata krama berbahasa. Seorang atasan di Mangkunegaran, kalau berbicara secara formal dengan bawahannya, harus menggunakan bahasa kromo (bahasa jawa halus), sebagaimana bawahan terhadap atasannya.⁸⁷ Tradisi semacam ini tidak terjadi di Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta yaitu demokratisasi unggah-ungguh.
3. Praja Mangkunegaran mempunyai konsepsi tersendiri tentang pembinaan masyarakat yang berkepribadian “kejawen” yang telah mendarah daging dan lebih mengutamakan keluruhan budi. Dari titik inilah Praja Mangkunegaran di samping mengarah pada sistem pembinaan dalam masyarakat dengan ajaran Tri Darma⁸⁸ juga dengan sarana kesenian sebagai salah satu cabang kebudayaan.
4. Namun demikian bukan berarti Mangkunegaran menghilangkan sama sekali tata krama kerajaan, unsur-unsur dan nuansa tersebut masih tetap ada, hanya sudah terjadi apa yang disebut sebagai perkawinan atau akulturasi antara “keprajaan dan kerakyatan”. Ini

⁸⁶ Wawancara dengan KRTH. Widijatmo Sontodipura tanggal 19 Januari 2006, lihat pula penjelasan mengenai Himpunan Kerabat Mangkunegaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKMN tahun 1970.

⁸⁷ Frans Magnis Suseno, 1993, *Etika Jawa, Sebuah Analisa Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: P.T. Gramedia, halaman 60.

⁸⁸ Wawancara dengan KRTH. Widijanto Sontodipuro tanggal 19 Januari 2006, lihat Mulyatmo Darma Saputra, 1980, *HKMN, Perombakan dan Penyusunan Kembali Tata Wangun*, Surakarta: Reksa Pustaka, halaman 25-26.

dapat ditemukan pada; a) Pesarean atau makam para Mangkunegoro. Terdapat di tiga tempat; Artana Mangandeg (MN I, II dan III), Astana Girilayu (MN IV, V, VII, VIII) dan Astana Nayu (MN VI).⁸⁹ Salah satu maksud tidak dikonsentrasikannya kompleks pemakaman ini di satu tempat, antara lain agar menyebar di antara rakyatnya. Namun demikian maksud tersebut tampaknya tidak berhasil di peroleh, karena unsur-unsur eksklusifisme tetap dipertahankan. b) Tetap ada perbedaan (hierarki) antara raja dan narapraja beserta keturunannya di satu pihak dengan kawulo dan rakyat di pihak lainnya dalam berbagai bidang kehidupan.⁹⁰

⁸⁹ Yayasan Cikal Bakal, tanpa tahun, *Daftar Makam Yang Dikelola Yayasan Cikal Bakal Mangkunegaran*, Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran.

⁹⁰ Wawancara dengan KRNGt. Kustini Soemardi Lukitohutomo, tanggal 19 Januari 2006.